

Indikator Ekonomi Indonesia

Yusi Yusianto, SE.,ME

Bab I

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagaimana diketahui, PDB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu periode (biasanya dinyatakan dalam 1 tahun). Berdasarkan definisi tersebut, PDB mencerminkan aktivitas ekonomi suatu negara. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan persentase PDB suatu periode (tahun) terhadap periode (tahun) sebelumnya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif, nol dan negatif:

- a. Pertumbuhan ekonomi positif berarti PDB periode berjalan lebih besar daripada PDB periode sebelumnya
- b. Pertumbuhan ekonomi nol berarti PDB periode berjalan sama dengan PDB periode sebelumnya
- c. Pertumbuhan ekonomi negatif berarti PDB periode berjalan lebih kecil daripada PDB periode sebelumnya

Berdasarkan uraian di atas, pemahaman PDB sangat penting dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana diketahui, data PDB Indonesia terbagi menjadi dua, yakni menurut lapangan usaha (sektoral) dan pengeluaran:

- a. PDB lapangan usaha adalah total nilai barang dan jasa sektoral (misalnya, sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi, dan lain-lain)
- b. PDB pengeluaran adalah total nilai pengeluaran (misalnya, pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor)

Kedua jenis PDB di atas dapat digunakan untuk menganalisis sumber pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi suatu negara.

Kedua jenis data PDB tersebut terdiri dari dua jenis data, yakni menurut:

- a. Harga berlaku (*current price*): PDB yang menggunakan harga periode berjalan
- b. Harga konstan (*constant price*): PDB yang menggunakan harga tahun dasar (misalnya, harga tahun 2010 yang dijadikan sebagai tahun dasar). PDB berdasarkan harga konstan ini sering juga disebut sebagai PDB riil.

Pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan data PDB yang menggunakan harga konstan; sedangkan analisis struktur atau distribusi persentase sering menggunakan data PDB berdasarkan harga berlaku.

Rumus pertumbuhan ekonomi:

$$g_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $g_{t_0-t_1}$ = pertumbuhan ekonomi tahun t_1
- PDB_t = pertumbuhan ekonomi tahun t (tahun berjalan)
- PDB_{t-1} = pertumbuhan ekonomi tahun t-1 (tahun sebelumnya)

Rumus distribusi persentase atau kontribusi PDB:

$$\text{Distribusi Persentase } PDB_i = \frac{PDB_i}{PDB_{Total}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PDB_i = nilai PDB sektor i (pada data PDB lapangan usaha) atau pengeluaran I (pada data PDB pengeluaran)
- PDB_{Total} = nilai total PDB

Apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara dihitung menggunakan data PDB; maka pertumbuhan ekonomi daerah atau provinsi menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Baik data PDB maupun PDRB dapat dilihat pada website Badan Pusat Statistik (BPS): <http://www.bps.go.id>.

Lampiran

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)

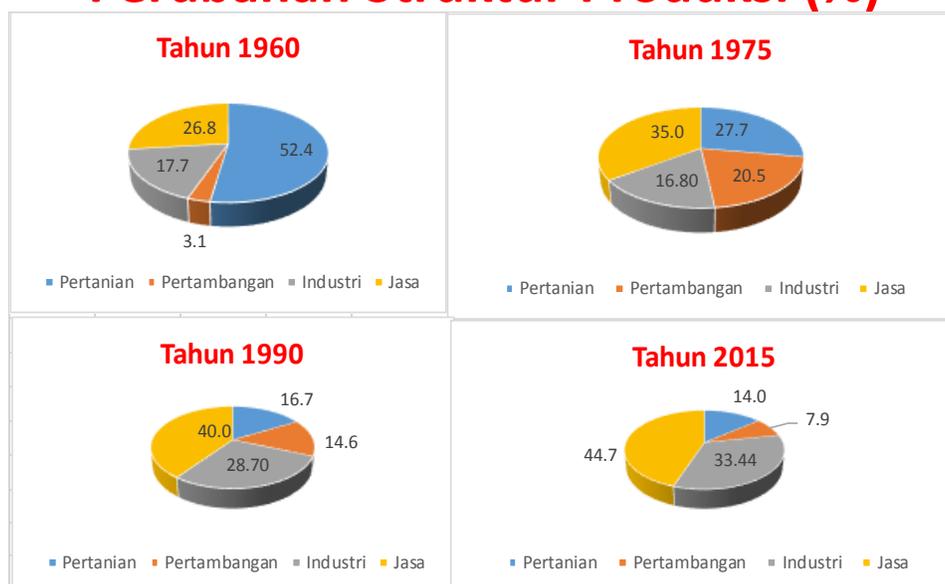
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2001	3.64
2002	4.50
2003	4.78
2004	5.03
2005	5.69
2006	5.50
2007	6.35
2008	6.01
2009	4.63
2010	6.22
2011	6.17
2012	6.03
2013	5.56
2014	5.01
2015	4.88
2016	5.03
2017	5.07
2018	5.27



Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%)

Negara	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Negara Industri Utama									
Amerika Serikat	2.5	1.80	2.21	1.70	2.50	2.90	1.60	2.20	-
Euro Area	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jerman	4.4	3.10	0.87	1.30	1.60	1.30	1.90	2.80	1.10
Perancis	2.2	1.69	-0.30	1.10	0.90	1.00	1.20	2.80	0.90
Italia	2.14	0.37	-2.40	-1.73	0.11	0.92	1.15	1.57	-
Jepang	4.75	-0.57	1.45	1.98	0.38	1.25	0.60	1.93	-
Inggris	1.5	0.92	0.30	2.10	2.90	2.30	1.80	1.80	-
Kanada	3.38	2.57	1.71	2.47	2.86	0.68	1.10	2.99	-
Beberapa Negara Eropa Lainnya									
Rusia	4.5	4.30	3.40	1.80	0.70	-2.50	0.30	1.50	-
Turki	9.2	8.50	2.20	8.49	4.97	5.92	3.22	7.36	-
Asia									
RRC	10.6	9.30	7.70	7.80	7.30	6.90	6.70	6.80	-
Korea Selatan	6.5	3.63	2.02	2.90	3.30	2.80	2.90	3.10	2.70
Hong Kong SAR	6.8	4.85	1.44	3.10	2.80	2.40	2.20	3.80	-
Taiwan, Provinsi China	10.63	4.07	1.48	2.20	4.02	0.81	1.51	3.08	2.60
India	9.35	7.75	4.65	4.73	6.40	7.40	8.00	8.20	7.20
Negara ASEAN-5									
Indonesia	6.1	6.49	6.23	5.58	5.02	4.88	5.03	5.07	5.17
Malaysia	7.4	5.08	5.60	4.70	6.00	5.10	4.20	5.90	-
Filipina	7.6	3.91	6.80	7.10	6.20	6.10	6.90	6.70	6.20
Singapura	2.83	5.16	4.57	2.38	1.03	-0.52	-0.53	0.59	0.44
Thailand	7.5	0.08	6.50	2.80	1.00	3.00	3.30	3.90	-
Australia	2.23	2.44	2.58	2.18	2.63	2.48	2.75	2.38	-
Amerika Tengah dan Selatan									
Argentina	9.4	8.87	2.00	2.41	-2.51	2.73	-1.82	2.85	-
Brazil	7.62	2.73	1.03	3.01	0.54	-3.54	-3.30	1.06	-
Mexico	5.1	3.92	3.90	1.40	2.30	2.60	2.30	2.00	-

Perubahan Struktur Produksi (%)



Perubahan Struktur Produksi di Beberapa Negara (%)

Country	1950				1960				1980				2005			
	AG	IND	MAN	SERV	AG	IND	MAN	SERV	AG	IND	MAN	SERV	AG	IND	MAN	SERV
China	51	21	14	29	39	32	27	29	30	49	40	21	13	48	34	40
India	55	14	10	31	43	20	14	38	36	25	17	40	18	28	16	54
Indonesia	58	9	7	33	51	15	9	33	24	42	13	34	13	47	28	40
Malaysia	40	19	11	41	35	20	8	46	23	41	22	36	8	50	3	42
Pakistan	61	7	7	32	46	16	12	38	30	25	16	46	21	27	19	51
Philippines	42	17	8	41	26	28	20	47	25	39	26	36	14	32	23	54
South Korea	47	13	9	41	35	16	10	48	16	37	24	47	3	40	28	56
Taiwan	34	22	15	45	29	27	19	44	8	46	36	46	2	26	22	72
Thailand	48	15	12	37	36	19	13	45	23	29	22	48	10	44	35	46
Turkey	49	16	11	35	42	22	13	36	27	20	17	54	11	27	22	63
Argentina	16	33	23	52	17	39	32	44	6	41	29	52	9	36	23	55
Brazil	24	24	19	52	21	37	30	42	11	44	33	45	6	30	18	64
Chile	15	26	17	59	12	41	25	47	7	37	22	55	4	42	16	53
Mexico	20	21	17	59	16	21	15	64	9	34	22	57	4	26	18	70
Averages																
Asia	49	14	10	36	39	20	14	41	25	33	22	42	13	35	24	52
Latin America	22	28	16	50	18	34	21	48	10	40	24	50	7	37	18	56
Developing Countries	41	19	11	40	33	25	15	42	21	35	20	44	16	34	18	51
16 Advanced Economies	15	42	31	43	10	42	30	48	4	36	24	59	2	28	17	70

Source: Szima (2011) in Andreoni (2012)



Bab II

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1. Kependudukan

Definisi penduduk (*population*) di sini didasarkan pada penduduk yang tinggal di suatu negara tanpa melihat status hukumnya atau kewarganegaraannya – kecuali pengungsi yang tinggal sementara di suatu negara.

Dalam menganalisis kependudukan, indikator yang biasanya digunakan, antara lain:

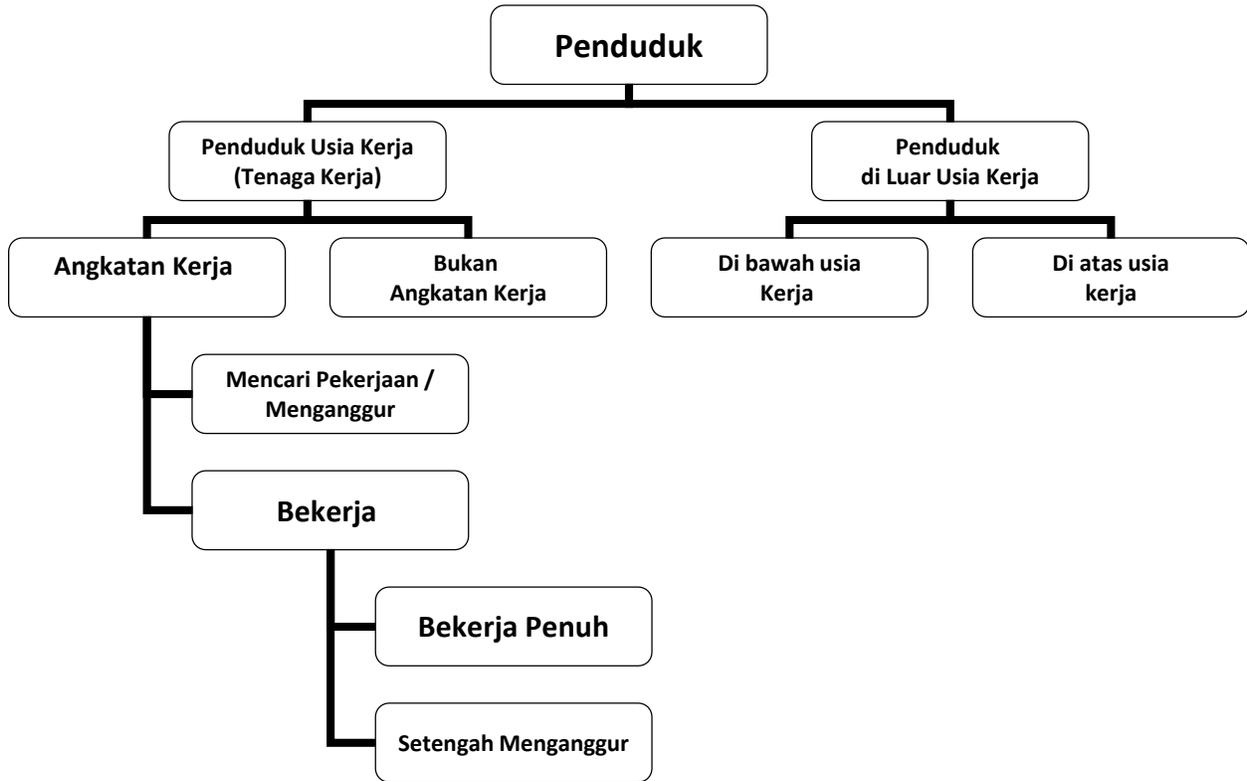
- Kepadatan penduduk (*population density*) adalah jumlah penduduk per kilometer per segi (km^2).
- Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun (*average annual population growth*) adalah perubahan eksponensial penduduk untuk periode waktu tertentu.
- Komposisi usia penduduk (*population age composition*) adalah persentase kelompok usia penduduk tertentu terhadap total penduduk.
- Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah rasio penduduk yang berusia lebih muda dari 15 tahun dan penduduk yang berusia lebih tua dari 64 tahun terhadap penduduk usia kerja yang berusia 15 hingga 64 tahun.
- Tingkat kematian kasar (*crude death rate / CDR*) adalah jumlah kematian yang terjadi selama setahun per 1.000 penduduk.
- Tingkat kelahiran kasar (*crude birth rate / CBR*) adalah jumlah kelahiran yang terjadi selama setahun per 1.000 penduduk.
- Tingkat kenaikan penduduk natural (*natural population increase rate*) adalah CBR dikurangi CDR. Tingkat kenaikan penduduk natural tidak mempertimbangkan migrasi yang terjadi.

2. Ketenagakerjaan

Dalam menganalisis ketenagakerjaan, beberapa istilah berikut perlu dipahami dengan baik:

- Angkatan kerja total (*total labor force*) adalah penduduk yang berusia 15 tahun dan ke atas yang aktif secara ekonomi, sesuai dengan definisi ILO. Dalam hal ini, angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja dan menganggur.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK = *labor force participation rate*) adalah persentase angkatan kerja terhadap total tenaga kerja.
- Bekerja adalah melakukan pekerjaan, yang lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu.
- Pengangguran (*unemployment*) adalah angkatan kerja yang tidak bekerja namun siap dan sedang mencari kerja.
- Penganggur terbuka terdiri dari:
 - a. Tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
 - b. Tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
 - c. Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan
 - d. Sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja.
- Pekerja tidak penuh adalah pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak penuh terdiri dari:
- Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

Anatomi Ketenagakerjaan



Lampiran

Penduduk menurut Golongan Umur dan *Dependency Ratio* (DR)

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	% Penduduk
1	0-14	70,295.3	26.84
2	15-19	22,212.9	8.48
3	20-24	21,703.6	8.29
4	25-29	21,022.2	8.03
5	30-34	20,509.1	7.83
6	35-39	20,072.5	7.66
7	40-44	18,884.2	7.21
8	45-49	17,028.0	6.50
9	50-54	14,601.5	5.58
10	55-59	11,903.3	4.55
11	60+	23,658.2	9.03
	Total	261,890.8	100.00
	DR (15-54)	67.84	
	DR (15-64)	48.12	

Penduduk Usia 15 Tahun menurut Golongan Umur dan Kegiatannya

Golongan Umur	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	TPAK	Tingkat Pengangguran
15 - 19	5,142,340	1,954,126	7,096,466	16,978,531	24,074,997	29.48	27.54
20 - 24	10,997,685	2,192,794	13,190,479	6,129,267	19,319,746	68.27	16.62
25 - 29	13,005,071	942,386	13,947,457	5,019,597	18,967,054	73.54	6.76
30 - 34	15,048,964	530,219	15,579,183	5,073,393	20,652,576	75.43	3.40
35 - 39	17,202,398	431,185	17,633,583	4,938,689	22,572,272	78.12	2.45
40 - 44	14,276,271	270,261	14,546,532	3,636,472	18,183,004	80.00	1.86
45 - 49	13,660,154	209,213	13,869,367	3,421,287	17,290,654	80.21	1.51
50 - 54	11,394,107	178,588	11,572,695	3,180,286	14,752,981	78.44	1.54
55 - 59	8,814,593	154,821	8,969,414	3,337,549	12,306,963	72.88	1.73
60 +	11,480,840	176,730	11,657,570	12,301,599	23,959,169	48.66	1.52
Total	121,022,423	7,040,323	128,062,746	64,016,670	192,079,416	66.67	5.50

Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama (%)

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	2017	
		Februari	Agustus
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	31.86	29.68
2	Pertambangan dan Penggalian	1.10	1.15
3	Industri	13.31	14.05
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	0.33	0.33
5	Konstruksi	5.75	6.72
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	23.37	23.28
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4.57	4.76
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2.88	3.10
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	16.82	16.92
	Total	100.00	100.00

Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikannya (%)

Lapangan Pekerjaan Utama	2017 Agustus								
	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan								
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak/belum tamat SD	SD	SLTP	SLTA Umum/SMU	SLTA Kejuruan/S MK	Akademi/Diploma	Universitas	Total
Pertanian	2.21	7.22	11.22	4.97	2.75	0.93	0.12	0.27	29.68
Pertambangan	0.02	0.17	0.33	0.21	0.21	0.11	0.03	0.06	1.15
Industri Pengolahan	0.25	1.30	3.28	3.12	2.82	2.41	0.27	0.60	14.05
Listrik, Gas, dan Air Minum	0.00	0.01	0.02	0.04	0.10	0.08	0.01	0.05	0.33
Konstruksi	0.09	0.79	2.38	1.68	0.92	0.56	0.07	0.24	6.72
Perdagangan	0.39	2.34	5.44	4.80	5.31	3.26	0.57	1.18	23.28
Transportasi	0.04	0.39	1.01	1.00	1.16	0.71	0.13	0.31	4.76
Lembaga Keuangan	0.01	0.06	0.18	0.25	0.79	0.54	0.25	1.03	3.10
Jasa Kemasyarakatan	0.14	0.91	1.93	1.87	3.39	1.80	1.26	5.62	16.92
Total	3.15	13.18	25.80	17.94	17.46	10.40	2.72	9.36	100.00

Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaannya (%)

Status Pekerjaan Utama	2017 Agustus									
	Lapangan Pekerjaan Utama									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
1	4.79	0.18	1.78	0.02	0.19	7.91	1.97	0.24	2.05	19.13
2	8.84	0.04	1.08	0.00	0.08	4.40	0.08	0.06	0.29	14.89
3	0.71	0.04	0.57	0.01	0.30	1.09	0.10	0.11	0.34	3.27
4	2.70	0.64	8.88	0.28	2.69	6.52	2.12	2.59	13.27	39.70
5	4.83	-	-	-	-	-	0.00	-	-	4.83
6	-	0.21	0.73	0.01	3.42	0.34	0.43	0.06	0.73	5.91
7	7.81	0.04	1.01	0.00	0.04	3.03	0.04	0.03	0.25	12.26
Total	29.68	1.15	14.05	0.33	6.72	23.28	4.76	3.10	16.92	100.00

Keterangan Status Pekerjaan Utama:

1 Berusaha Sendiri

2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar

3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar

4 Buruh/Karyawan/Pegawai

5 Pekerja bebas pertanian

6 Pekerja bebas non pertanian

7 Pekerja keluarga/tak dibayar

Penduduk yang Bekerja menurut Status dan Pendidikannya (%)

Status Pekerjaan Utama	2017 Agustus								
	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan								
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak/belum tamat SD	SD	SLTP	SLTA Umum/SMU	SLTA Kejuruan/S MK	Akademi/Diploma	Universitas	Total
1	0.69	3.24	5.96	3.72	3.16	1.52	0.29	0.55	19.13
2	1.01	3.18	5.14	2.52	1.85	0.77	0.13	0.30	14.89
3	0.04	0.32	0.70	0.60	0.76	0.34	0.11	0.40	3.27
4	0.23	2.12	5.71	6.23	8.99	6.55	2.05	7.82	39.70
5	0.30	1.35	2.08	0.73	0.27	0.10	0.00	0.01	4.83
6	0.13	0.83	2.33	1.52	0.67	0.38	0.02	0.03	5.91
7	0.74	2.14	3.88	2.63	1.77	0.74	0.11	0.26	12.26
Total	3.15	13.18	25.80	17.94	17.46	10.40	2.72	9.36	100.00

Pengangguran menurut Pendidikannya (%)

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2017		2017 (%)	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Tidak/belum pernah sekolah	92,331	62,984	1.32	0.89
2	Tidak/belum tamat SD	546,897	404,435	7.81	5.74
3	SD	1,292,234	904,561	18.45	12.85
4	SLTP	1,281,240	1,274,417	18.29	18.10
5	SLTA Umum/SMU	1,552,894	1,910,829	22.17	27.14
6	SLTA Kejuruan/SMK	1,383,022	1,621,402	19.74	23.03
7	Akademi/Diploma	249,705	242,937	3.56	3.45
8	Universitas	606,939	618,758	8.66	8.79
	Total	7,005,262	7,040,323	100.00	100.00

Bab III

Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

1. Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah ekonomi sosial klasik di dunia, termasuk di Indonesia, yang sampai sekarang belum dapat dihilangkan. Oleh karenanya, hingga sekarang, program peningkatan kesejahteraan, terutama pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, senantiasa menjadi program utama ekonomi sosial bangsa-bangsa di dunia.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dalam pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk itu, digunakan penghitungan Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen:

- a. Garis Kemiskinan Makanan (GKM)
- b. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan karena biaya hidup antara kota dan desa.

Secara definisi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK.

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Keterangan:

- GK = Garis Kemiskinan
- GKM = Garis Kemiskinan Makanan
- GKNM = Garis Kemiskinan Nonmakanan

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi makanan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi yang paling banyak ($\pm 70\%$ dari total pengeluaran) dikonsumsi oleh orang miskin.

GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

HCI (*head count index*) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK). Ini lah yang didefinisikan sebagai kemiskinan. Dalam analisis kemiskinan, indikator yang sering diangkat adalah kemiskinan adalah jumlah orang miskin dan persentase orang miskin.

Ada indikator kemiskinan lainnya yang juga sering dipublikasi oleh BPS:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.
2. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) adalah indeks yang memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan (*income inequality*) adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah:

- a. Koefisien atau Indeks Gini: koefisien yang berkisar antara 0% - 100% atau indeks yang berkisar antara 0 – 1. Angka 0 atau 0% berarti distribusi pendapatannya sangat merata; sedangkan kalau angkanya 1 atau 100% berarti distribusi pendapatannya sangat tidak merata atau sangat timpang. Semakin angkanya mendekati 0 atau 0%, maka tingkat ketimpangannya semakin rendah; sebaliknya, semakin angkanya mendekati 1 atau 100%, maka tingkat ketimpangannya semakin tinggi. Dalam prakteknya, ketimpangan pendapatan seringkali data yang digunakan adalah data pengeluaran. Dengan demikian, interpretasi angkanya dapat dalam bentuk distribusi pengeluaran, bukan distribusi pendapatan.
- b. Kelompok distribusi pendapatan: membandingkan perkembangan kelompok pendapatan masyarakat, yang dibagi menurut 40% pendapatan terendah, 40% pendapatan menengah dan 20% pendapatan tertinggi. Perbandingan tersebut untuk membandingkan perkembangan antara porsi pendapatan penduduk 40% pendapatan terendah dan porsi pendapatan penduduk 20% tertinggi. Perbandingan tersebut akan dapat membawa pada kesimpulan apakah distribusi pendapatannya cenderung semakin merata atau justru timpang. Dalam praktiknya, data pendapatan seringkali diganti dengan data pengeluaran.

Lampiran

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa
1970	n.a	n.a	70.00	n.a	n.a	60.00	n.a	n.a
1976	10.00	44.20	54.20	38.80	40.40	40.10	4 522	2 849
1978	8.30	38.90	47.20	30.80	33.40	33.30	4 969	2 981
1980	9.50	32.80	42.30	29.00	28.40	28.60	6 831	4 449
1981	9.30	31.30	40.60	28.10	26.50	26.90	9 777	5 877
1984	9.30	25.70	35.00	23.10	21.20	21.60	13 731	7 746
1987	9.70	20.30	30.00	20.10	16.10	17.40	17 381	10 294
1990	9.40	17.80	27.20	16.80	14.30	15.10	20 614	13 295
1993	8.70	17.20	25.90	13.40	13.80	13.70	27 905	18 244
1996	7.20	15.30	22.50	9.70	12.30	11.30	38 246	27 413
1996	9.42	24.59	34.01	13.39	19.78	17.47	42 032	31 366
1998	17.60	31.90	49.50	21.92	25.72	24.20	96 959	72 780
1999	15.64	32.33	47.97	19.41	26.03	23.43	92 409	74 272
2000	12.31	26.43	38.74	14.60	22.38	19.14	91 632	73 648
2001	8.60	29.27	37.87	9.79	24.84	18.41	100 011	80 382
2002	13.32	25.08	38.39	14.46	21.10	18.20	130 499	96 512
2003	12.26	25.08	37.34	13.57	20.23	17.42	138 803	105 888
2004	11.37	24.78	36.15	12.13	20.11	16.66	143 455	108 725
2005	12.40	22.70	35.10	11.68	19.98	15.97	165 565	117 365
2006	14.49	24.81	39.30	13.47	21.81	17.75	174 290	130 584
2007	13.56	23.61	37.17	12.52	20.37	16.58	187 942	146 837
2008	12.77	22.19	34.96	11.65	18.93	15.42	204 896	161 831
2009	11.91	20.62	32.53	10.72	17.35	14.15	222 123	179 835
2010	11.10	19.93	31.02	9.87	16.56	13.33	232 989	192 354
Maret 2011	11.05	18.97	30.02	9.23	15.72	12.49	253 016	213 395
Sept 2011	10.95	18.94	29.89	9.09	15.59	12.36	263 594	223 181
Maret 2012	10.65	18.49	29.13	8.78	15.12	11.96	267 408	229 226
Sept 2012	10.51	18.09	28.59	8.60	14.70	11.66	277 382	240 441
Maret 2013	10.33	17.74	28.07	8.39	14.32	11.37	289 042	253 273
Sept 2013	10.63	17.92	28.55	8.52	14.42	11.47	308 826	275 779
Maret 2014	10.51	17.77	28.28	8.34	14.17	11.25	318 514	286 097
Sept 2014	10.36	17.37	27.73	8.16	13.76	10.96	326 853	296 681
Maret 2015	10.65	17.94	28.59	8.29	14.21	11.22	342 541	317 881
Sept 2015	10.62	17.89	28.51	8.22	14.09	11.13	356 378	333 034
Maret 2016	10.34	17.67	28.01	7.79	14.11	10.86	364 527	343 647
Sept 2016	10.49	17.28	27.76	7.73	13.96	10.70	372 114	350 420
Maret 2017	10.67	17.10	27.77	7.72	13.93	10.64	385 621	361 496
Sep-17	10.27	16.31	26.58	7.26	13.47	10.12	400 995	370 910

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

	Kota	Desa	Kota + Desa
P1			
Maret 2016	1,19	2,74	1,94
Sep 2016	1,21	2,32	1,74
Maret 2017	1,24	2,49	1,83
Sep 2017	1,24	2,43	1,79
P2			
Maret 2016	0,27	0,79	0,52
Sep 2016	0,29	0,59	0,44
Maret 2017	0,31	0,67	0,48
Sep 2017	0,30	0,65	0,46

Distribusi Pengeluaran per kapita dan Indeks Gini

Daerah	Tahun	40% Berpengeluaran Rendah	40% Berpengeluaran Sedang	20% Berpengeluaran Tinggi	Indeks Gini
Kota	2010	17.57	36.99	45.44	0.38
	2011	16.10	34.79	49.11	0.42
	2012	16.00	34.53	49.48	0.42
	2013	15.40	34.83	49.77	0.43
	2014	15.62	34.89	49.49	0.43
	2015	15.83	34.60	49.57	0.43
	2016	15.91	36.74	47.35	0.41
Desa	2010	20.98	38.78	40.24	0.32
	2011	19.96	37.46	42.58	0.34
	2012	20.60	37.57	41.82	0.33
	2013	21.03	37.96	41.00	0.32
	2014	20.94	38.40	40.65	0.32
	2015	20.42	37.53	42.05	0.33
	2016	20.40	38.50	41.10	0.33
Kota+Desa	2010	18.05	36.48	45.47	0.38
	2011	16.85	34.73	48.42	0.41
	2012	16.98	34.41	48.61	0.41
	2013	16.87	34.09	49.04	0.41
	2014	17.12	34.60	48.27	0.41
	2015	17.10	34.65	48.25	0.41
	2016	17.02	36.09	46.89	0.40

Gini Ratio Indonesia

	Kota	Desa	Kota+Desa
2002	0.344	0.26	0.341
2005	0.351	0.28	0.355
2007	0.374	0.302	0.376
2008	0.367	0.3	0.368
2009	0.372	0.295	0.367
2010	0.382	0.315	0.378
2011			
Mar	0.422	0.34	0.41
Sep	0.396	0.329	0.388
2012			
Mar	0.425	0.33	0.41
Sep	0.425	0.327	0.413
2013			
Mar	0.431	0.32	0.413
Sep	0.424	0.324	0.406
2014			
Mar	0.428	0.319	0.406
Sep	0.433	0.336	0.414
2015			
Mar	0.428	0.334	0.408
Sep	0.433	0.329	0.402
2016			
Mar	0.41	0.327	0.397
Sep	0.409	0.316	0.394
2017			
Mar	0.407	0.32	0.393
Sep	0.404	0.32	0.391

Bab IV Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus dalam satu periode.

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang diperhatikan oleh pelaku pasar. Oleh karenanya, inflasi seringkali diekspektasi oleh pelaku ekonomi untuk mengantisipasi dampaknya pada stabilisasi ekonomi. Stabilisasi ekonomi tercermin pada, antara lain, tingkat bunga dan kurs.

Sebagaimana dikemukakan pada pengertiannya, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat sangat banyak, baik kuantitas, macam dan kualitasnya. Namun, tidak semua barang dan jasa dimasukkan ke dalam “keranjang” barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung inflasi. Barang dan jasa yang dimasukkan ke dalam “keranjang” perhitungan inflasi hanya barang dan jasa yang dianggap paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat umum. Di Indonesia, untuk menyusun inflasi yang berdasarkan dari konsumsi masyarakat diperoleh dari hasil **Survei Biaya Hidup (SBH)**.

Inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan rumus Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres*). Rumus tersebut mengacu pada manual Organisasi Buruh Dunia (*International Labor Organisation/ILO*). Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP)* yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

IHK menurut metode Laspeyres:

$$IHK_n = \frac{\sum \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} Q_{0i}} \times 100$$

Keterangan:

- IHK_n = IHK periode ke n
- P_{ni} = harga barang i, periode ke n
- $P_{(n-1)i}$ = harga barang i, periode ke n-1
- P_{0i} = harga barang i, periode tahun dasar
- Q_{0i} = kuantitas barang i, periode tahun dasar
- k = jumlah jenis paket barang komoditas

secara umum, perhitungan inflasi dari IHK mengikuti rumus berikut:

$$INFL_t = \left(\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- $INFL_t$ = Inflasi tahun t

- IHK_t = Indeks harga konsumen tahun t (tahun berjalan)
- IHK_{t-1} = Indeks harga konsumen tahun t-1 (tahun sebelumnya)

Menurut komponennya, inflasi (umum) terdiri dari **inflasi inti** (*core inflation*), **inflasi administered prices**, dan **inflasi volatile goods**:

1. *Core Inflation*: inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran, yang sifatnya cenderung permanen, *persistent*, dan *bersifat* umum. Berdasarkan SBH, jumlah komoditasnya sebanyak 692 antara lain, kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya.
2. *Inflasi Administered Price*: inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya secara umum dapat diatur pemerintah. Berdasar SBH, jumlah komoditasnya sebanyak 21 antara lain bensin, tarif, listrik, rokok, dan sebagainya.
3. *Inflasi Volatile Goods*: Inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun dasar 2007, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*. Jumlah komoditasnya sebanyak 61 antara lain beras, minyak, goreng, cabe, daging ayam ras, dan sebagainya.

Untuk menjaga tingkat inflasi pada batas yang dapat ditoleransi serta menjaga stabilitas ekonomi, maka Bank Indonesia menetapkan target inflasi setiap tahunnya. Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia oleh Pemerintah. Dalam Nota kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sebagai contoh, berdasarkan PMK o. 143/PMK.011/2010 sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2010 – 2012, masing-masing sebesar 5,0%, 5,0%, dan 4,5% dengan deviasi $\pm 1\%$.

Lampiran

Tingkat Inflasi Indonesia menurut Pengeluarannya (%)

Tahun/Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Umum	
2019		-0.20	0.58	0.53	0.74	0.63	0.35	-0.11	0.24
	Februari	-1.11	0.31	0.25	0.27	0.36	0.11	0.05	-0.08
	Januari	0.92	0.27	0.28	0.47	0.27	0.24	-0.16	0.32
2018		3.41	3.91	2.43	3.59	3.14	3.15	3.16	3.13
2017		1.26	4.10	5.14	3.92	2.99	3.33	4.23	3.61
2016		5.69	5.38	1.90	3.05	3.92	2.73	-0.72	3.02
2015		4.93	6.42	3.34	3.43	5.32	3.97	-1.53	3.35
2014		10.57	8.11	7.36	3.08	5.71	4.44	12.14	8.36
2013		11.35	7.45	6.22	0.52	3.70	3.91	15.36	8.38
2012		5.68	6.11	3.35	4.67	2.91	4.21	2.20	4.30
2011		3.64	4.51	3.47	7.57	4.26	5.16	1.92	3.79
2010		15.64	6.96	4.08	6.51	2.19	3.29	2.69	6.96
2009		3.88	7.81	1.83	6.00	3.89	3.89	-3.67	2.78

Tingkat Inflasi menurut Komponennya (%)

Tahun	Umum	Inti	Harga Yang Diatur Pemerintah	Barang Bergejolak
2018 (s/d Agst)	2.13	2.09	1.27	3.30
2017	3.61	2.95	8.70	0.71
2016	3.02	3.07	0.21	5.92
2015	3.35	3.95	0.39	4.84
2014	8.36	4.93	17.57	10.88
2013	8.38	4.98	16.65	11.83
2012	4.30	4.40	2.66	5.68
2011	3.79	4.34	2.78	3.37
2010	6.96	4.28	5.40	17.74
2009	2.78	4.28	-3.26	3.95

Tingkat Inflasi dan Target Inflasi (%)

Tahun	Inflasi Aktual	Target Inflasi		
		Kisaran	min	max
2001	12.55	4-6	4	6
2002	10.03	9-10	9	10
2003	5.06	9±1	8	10
2004	6.40	5.5±1	4.5	6
2005	17.11	6±1	5	7
2006	6.60	8±1	7	9
2007	6.59	6±1	5	7
2008	11.06	5±1	4	6
2009	2.78	4.5±1	3.5	5.5
2010	6.96	5±1	4	6
2011	3.79	5±1	4	6
2012	4.30	4.5±1	3.5	5.5
2013	8.38	4.5±1	3.5	5.5
2014	8.36	4.5±1	3.5	5.5
2015	3.35	4±1	3	5
2016	3.02	4±1	3	5
2017	3.61	4±1	3	5
2018	3.13	3.5±1	2.5	4.5

Tingkat Inflasi di beberapa Negara (%)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Negara Industri Utama							
Amerika Serikat	1.7	1.2	1.3	0.5	1.8	2.1	2.2
Euro Area							
Jerman	2.0	1.4	0.4	0.2	1.0	1.6	2.1
Perancis	1.5	0.8	0.3	0.2	0.7	1.2	2.2
Italia	2.6	0.6	0.2	0.2	0.2	1.1	1.5
Jepang	-0.1	1.4	2.6	0.3	0.3	0.6	0.8
Inggris	2.7	2.1	0.9	0.1	1.2	3.0	2.3
Kanada	0.8	0.9	2.0	1.3	1.4	1.8	2.0
Beberapa Negara Eropa Lainnya							
Rusia	6.6	6.4	9.6	14.5	5.8	2.6	3.9
Turki	6.2	7.5	8.8	8.2	7.6	12.3	22.4
Asia							
RRC	2.5	2.9	1.5	1.5	2.2	1.8	2.2
Korea Selatan	2.2	1.1	1.0	0.9	1.4	1.5	1.8
Hong Kong SAR	3.7	4.3	5.1	2.3	1.2	1.6	2.6
Taiwan, Provinsi China	1.1	0.6	0.8	0.3	1.8	0.4	0.5
India	11.2	10.6	4.1	5.3	3.8	4.6	2.6
Negara ASEAN-5							
Indonesia	4.3	8.4	8.4	4.9	3.6	3.3	3.2
Malaysia	1.6	3.0	2.8	2.6	1.7	3.5	0.3
Filipina	3.2	3.4	2.9	0.3	2.0	3.0	5.9
Singapura	4.3	2.0	-0.1	-0.7	0.0	0.5	0.5
Thailand	3.6	1.7	1.1	-0.9	0.7	0.9	0.8
Australia	2.2	2.7	1.7	1.7	1.5	1.9	1.8
Amerika Tengah dan Selatan							
Argentina	10.8	29.8	41.3	26.9	37.0	-	-
Brazil	5.8	5.8	6.5	10.4	7.1	2.8	4.1
Mexico	3.6	3.7	4.2	2.3	3.2	6.6	4.8

Bab V

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam upaya mencapai salah satu atau beberapa tujuannya. Tujuan tersebut, antara lain, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, stabilisasi ekonomi, dan lainnya.

Dalam menganalisis kebijakan fiskal, analisis dilakukan dengan menggunakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, pemahaman mengenai pos-pos atau istilah dalam APBN sangat perlu. Pos-pos atau istilah dalam APBN, antara lain:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
- Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
- Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan (Pph), pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa, dan pajak penjualan (Ppn) atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya.
- Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam (SDA), bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).
- Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.
- Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN).
- BA-BUN adalah kelompok anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.
- Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi, antara lain, pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan kemanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.
- Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

- Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.
- Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan pada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan pada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.
- Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, seperti Dana Insentif Daerah (DID), Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
- Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi dana investasi pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan pemerintah.
- Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
- Saldo anggaran lebih (SAL) adalah akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
- Surat berharga negara (SBN) meliputi surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN).
- SUN adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

Arah kebijakan fiskal:

- a. Ekspansif: pajak diturunkan atau pengeluaran pemerintah dinaikkan
- b. Kontraktif: pajak dinaikkan atau pengeluaran pemerintah diturunkan

Asumsi Ekonomi Makro, yang mendasari penyusunan APBN:

- Pertumbuhan ekonomi (%)
- Inflasi y.o.y (%)
- Nilai tukar rupiah (Rp / US \$)
- Suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SPN (Surat Perbendaharaan Negara) 3 bulan rata-rata (%)
- Harga minyak mentah Indonesia (US \$ / barel)
- *Lifting* (produksi) minyak (ribu barel / hari)

Anatomi APBN:

Pendapatan Negara dan Hibah

I. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan Perpajakan
 - a. Pajak Dalam Negeri
 - b. Pajak Perdagangan Internasional
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - a. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)
 - b. Bagian Laba BUMN
 - c. PNBP Lainnya
 - d. Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum)

II. Hibah

Penerimaan Perpajakan

1. PAJAK DALAM NEGERI
 - a. Pajak Penghasilan (Pph)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - e. Cukai
 - f. Pajak Lainnya
2. PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
 - a. Bea Masuk
 - b. Bea Keluar

Belanja Pemerintah Pusat

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Belanja Hibah
7. Bantuan Sosial

8. Belanja Lain-lain

Subsidi

1. ENERGI
 - a. Subsidi BBM
 - b. Subsidi Listrik
2. NON ENERGI
 - a. Subsidi Pangan
 - b. Subsidi Pupuk
 - c. Subsidi Benih
 - d. PSO (*Public Service Obligation*)
 - e. Kredit Pogram
 - f. Subsidi Pajak

Transfer ke Daerah

- I. Dana Perimbangan
 1. Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a. Pajak:
 - i. Pajak Penghasilan
 - ii. Pajak Bumi dan Bangunan
 - iii. BPHTB
 - iv. Cukai
 - b. Sumber Daya Alam (SDA)
 2. Dana Alokasi Umum (DAU)
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- II. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Pembiayaan Anggaran

- I. Pembiayaan Dalam Negeri:
 1. Perbankan Dalam Negeri
 2. Non Perbankan Dalam Negeri:
 - a. Privatisasi
 - b. Hasil Pengelolaan Aset
 - c. Surat Berharga Negara (neto)
 - d. Pinjaman Dalam Negeri
- II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)

Lampiran

Ringkasan Indikator APBN

KETERANGAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Negara dan Hibah	995,271	1,210,600	1,338,110	1,438,891	1,550,491	1,508,020	1,555,934
Belanja Negara	1,042,117	1,294,999	1,491,410	1,650,564	1,777,183	1,806,515	1,864,275
Posisi Keuangan (+/-)	-46,846	-84,400	-153,301	-211,673	-226,692	-298,495	-308,341
Pembayaran Bunga Utang	88,383	93,262	100,516	113,035	133,441	156,010	182,761
Keseimbangan Primer (Primary Balance)	41,537	8,863	-52,785	-98,637	-93,251	-142,485	-125,580
% terhadap PDB:							
Pendapatan Negara thd PDB (%)	14.50	15.46	15.53	15.07	14.67	13.08	12.54
Belanja Negara terhadap PDB (%)	15.18	16.54	17.31	17.29	16.81	15.67	15.03
Rasio Defisit terhadap PDB (%)	(0.68)	(1.08)	(1.78)	(2.22)	(2.14)	(2.59)	(2.49)
Rasio Pembayaran Bunga thd PDB (%)	1.29	1.19	1.17	1.18	1.26	1.35	1.47
Rasio Keseimbangan Primer thd PDB (%)	0.61	0.11	(0.61)	(1.03)	(0.88)	(1.24)	(1.01)

Distribusi Penerimaan Pemerintah (%)

KETERANGAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Realisasi							
Pendapatan Negara dan Hibah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Penerimaan Perpajakan	72.67	72.19	73.28	74.87	73.97	82.25	82.59
Pajak Dalam Negeri	69.77	67.71	69.57	71.57	71.15	79.94	80.31
PPH	35.87	35.61	34.76	35.20	35.23	39.94	42.82
Non Migas	29.96	29.57	28.52	28.76	29.59	36.65	40.50
Migas	5.92	6.04	6.24	6.44	5.64	3.29	2.32
PPN	23.17	22.95	25.23	26.74	26.39	28.10	26.49
PBB	2.87	2.47	2.16	1.76	1.51	1.94	1.25
BPHTB	0.81	(0.00)	-	-	-	0.00	0.00
Cukai	6.65	6.36	7.10	7.54	7.62	9.59	9.22
Pajak Lainnya	0.40	0.32	0.31	0.34	0.41	0.37	0.52
Pajak Perdagangan Internasional	2.91	4.47	3.71	3.30	2.82	2.32	2.28
Bea Masuk	2.01	2.09	2.12	2.20	2.08	2.07	2.09
Pajak Ekspor	0.89	2.38	1.59	1.10	0.73	0.25	0.19

Distribusi Persentase Belanja Pemerintah (%)

KETERANGAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Belanja Negara	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Belanja Pemerintah Pusat	66.92	68.24	67.76	68.90	67.72	65.50	61.90
Belanja Pegawai	14.21	13.57	13.27	13.43	13.71	15.56	16.37
Belanja Barang	9.37	9.62	9.45	10.28	9.94	12.91	13.93
Belanja Modal	7.70	9.10	9.73	10.96	8.29	11.93	9.09
Pembayaran Bunga Utang	8.48	7.20	6.74	6.85	7.51	8.64	9.80
Utang Dalam Negeri	5.90	5.16	4.71	5.98	6.69	7.86	9.00
Utang Luar Negeri	2.58	2.04	2.03	0.87	0.82	0.78	0.81
Subsidi	18.49	22.81	23.23	21.51	22.06	10.29	9.35
Subsidi BBM	13.43	19.74	20.55	12.72	13.50	3.36	2.39
Subsidi Non BBM	5.06	3.07	2.68	8.79	8.55	6.93	6.95
Belanja Hibah	0.01	0.02	0.01	0.08	0.05	0.24	0.38
Bantuan Sosial	6.58	5.49	5.07	5.58	5.51	5.38	2.66
Pengeluaran rutin lainnya /Belanja Lainnya	2.08	0.42	0.27	0.20	0.66	0.56	0.32
Anggaran Belanja untuk Daerah/ Transfer ke Daerah	33.08	31.76	32.23	31.10	32.28	34.49	38.10
Dana Perimbangan	30.39	26.81	27.58	26.07	26.84	26.89	34.32
Dana Bagi Hasil	8.85	7.48	7.48	5.36	5.85	4.32	4.86
Dana Alokasi Umum	19.53	17.42	18.36	18.85	19.20	19.53	20.67
Dana Alokasi Khusus	2.01	1.92	1.74	1.86	1.79	3.04	8.79
Dana otonomi khusus dan penyeimbangan	2.69	4.95	4.65	5.02	5.44	6.45	1.28
Dana Desa	-	-	-	-	-	1.15	2.50

Distribusi Persentase Pembiayaan Pemerintah

KETERANGAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
POSISI ANGGARAN (SURPLUS/DEFISIT)	-46,846	-84,399	-153,301	-211,673	-226,692	-298,495	-308,341
PEMBIAYAAN BERSIH	91,552	130,949	175,158	237,395	248,893	323,108	334,503
1. Pembiayaan Dalam Negeri	96,119	148,748	198,623	243,200	261,245	307,858	344,923
a. Perbankan Dalam Negeri (SAL/SAK)	22,189	48,928	56,170	30,000	0	0	19,011
b. Non Perbankan Dalam Negeri	73,929	99,820	142,453	213,200	261,245	307,858	325,912
i. Penerimaan Privatisasi	3,232	1,598	1,278	1,500	544	342	552
ii. Obligasi Negara	91,103	119,864	159,704	224,673	264,629	362,257	407,259
c. Pinjaman Dalam Negeri	394	619	800	474	950	832	1,052
d. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	-19,799	-19,644	-18,863	-11,915	-8,913	-59,655	-84,080
e. Penerusan Pinjaman	0	0	6,533	4,174	4,999	0	0
f. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	-1,000	-2,618	-7,000	-5,000	0	0	-5,000
g. Lain-lain	0	0	0	-706	-964	4,081	6,129
2. Pembiayaan Luar Negeri	-4,567	-17,799	-23,464	-5,805	-12,352	15,250	-10,420
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, bruto	54,795	33,747	31,403	55,280	52,575	83,821	63,424
i. Pinjaman Program	28,975	15,266	15,003	18,426	17,777	55,085	35,325
ii. Pinjaman Proyek	25,820	18,481	16,400	36,853	34,798	28,737	28,099
b. Penerusan Pinjaman	-8,729	-4,224	-3,753	-3,881	-2,506	-2,576	-5,118
c. Pembayaran cicilan, pokok hutang LN (amortisasi)	-50,633	-47,323	-51,115	-57,204	-62,421	-65,995	-68,726
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA)	44,706	46,549	21,858	25,722	22,201	24,613	26,162

Bab VI

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter (*monetary policy*) adalah kebijakan otoritas moneter dalam mengelola uang beredar atau tingkat bunga dalam upaya mencapai tujuan ekonominya. Tujuan ekonomi tersebut, antara lain, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesempatan kerja. Dari berbagai tujuan ekonomi tersebut, umumnya bank sentral selaku otoritas moneter suatu negara lebih memprioritaskan untuk menjaga stabilisasi ekonomi. Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia, menetapkan tujuannya adalah menjaga nilai rupiah. Maksud menjaga nilai rupiah di sini adalah menjaga nilai rupiah atas kenaikan harga barang dan jasa (inflasi) dan mata uang negara lainnya (kurs). Hal tersebut menunjukkan tujuan utama Bank Indonesia adalah stabilisasi ekonomi.

Dengan demikian, instrument kebijakan moneter dapat dilihat dari kebijakan yang berhubungan dengan uang beredar atau tingkat bunga.

Uang Beredar (money supply)

Uang beredar terdiri dari:

1. Uang dalam arti sempit (*Narrow Money / M₁*): M_1 (*narrow money*) terdiri dari uang kartal di luar Bank Umum dan BPR ditambah simpanan giro rupiah milik masyarakat pada Bank Umum (BPR hingga kini tidak diperbolehkan menerima simpanan dalam bentuk giro) dan giro sektor swasta di Bank Indonesia.
2. Uang dalam arti luas (*Broad Money / M₂*): M_2 (*broad money*) = Kewajiban sistem moneter (otoritas moneter, bank umum, dan BPR) kepada sektor swasta (di luar pemerintah pusat dan luar negeri). M_2 terdiri dari uang kartal di luar bank umum dan BPR, simpanan giro rupiah, uang kuasi, dan surat berharga selain saham yang dapat diperjualbelikan dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Secara singkat, M_2 terdiri dari M_1 dan uang kuasi (sering disebut juga sebagai likuiditas perekonomian)

Istilah yang berkaitan dengan uang beredar:

- Uang kartal (*currencies*) terdiri dari uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah.
- Uang giral (*demand deposit*) adalah simpanan rupiah milik penduduk pada sistem moneter, yang terdiri atas rekening giro, kiriman uang (*transfer*), dan kewajiban segera lainnya, antara lain, simpanan berjangka yang sudah jatuh waktu.
- Uang kuasi (*quasi money*) merupakan simpanan masyarakat pada sistem moneter yang terdiri dari tabungan dan simpanan berjangka baik dalam rupiah maupun valutas asing, serta simpanan lainnya dalam valuta asing.
- Bank Umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan dapat menciptakan uang giral serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Umum melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah.
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- Giro (*demand deposit*): simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro (BG), sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- Tabungan (*saving deposit*): simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, BG, dan/atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.
- Deposito berjangka (*time deposit*): simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Dalam uang beredar, terdapat jenis “uang” yang sangat erat dengan uang beredar, yang dikenal sebagai uang primer atau uang inti (*base money* atau M_0). Uang Primer (*Base Money / M_0*) merupakan kewajiban otoritas moneter kepada Bank Umum dan BPR serta sektor swasta (tidak termasuk pemerintah pusat dan luar negeri), yang terdiri dari uang kartal, saldo giro positif Bank Umum pada Bank Indonesia (BPR tidak memiliki giro pada Bank Indonesia) dalam rupiah, dan simpanan giro sektor swasta. Sejak tahun 2009, komponen uang primer ditambah dengan SBI yang digunakan untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum Sekunder (GWM Sekunder).

Pada hakekatnya, arah kebijakan moneter yang bertujuan untuk menstabilisasi ekonomi terdiri dari dua:

- a. Kebijakan uang longgar (*easy monetary policy*): kebijakan moneter yang cenderung meningkatkan uang beredar atau menurunkan tingkat bunga dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja.
- b. Kebijakan uang ketat (*tight monetary policy*): kebijakan moneter yang cenderung menurunkan uang beredar atau meningkatkan tingkat bunga dalam upaya menurunkan tingkat inflasi.

Secara umum, terdapat tiga instrumen kebijakan moneter, antara lain:

1. Operasi pasar terbuka (*open market operation*): melakukan beli dan jual surat berharga di pasar uang.
2. Tingkat diskonto (*discount rate*): mengubah tingkat diskonto bagi perbankan yang ingin pinjam pada bank sentral.
3. Rasio cadangan wajib (*reserve requirement ratio*): mengubah ketentuan giro wajib minimum (GWM) bagi perbankan.

Dari ketiga instrumen di atas, operasi pasar terbuka merupakan instrumen yang paling aktif dilakukan oleh Bank Indonesia. Oleh karenanya, pemahaman mengenai operasi pasar terbuka sangat penting dalam mencoba memahami arah kebijakan Bank Indonesia.

Di bawah ini, beberapa istilah yang berkaitan dengan operasi pasar terbuka:

- Transaksi Pasar Uang : transaksi keuangan berjangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun), yang meliputi penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Deposit facility*, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), *Term Deposit*, Repo, Pasar Uang Antar Bank (PUAB), dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).
- Operasi Moneter : pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan koridor suku bunga (*standing facility*).

- Operasi pasar terbuka (OPT): kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh BI dengan bank dan/atau pihak lain dalam rangka operasi moneter.
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI): surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
- *Term Deposit*: penempatan dana rupiah milik peserta OPT secara berjangka di Bank Indonesia.
- *Repurchase Agreement* (Repo): transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT kepada BI dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- *Reverse Repo*: transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT dari BI dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- *Deposit facility*: kegiatan penempatan dana rupiah oleh bank di BI dalam rangka operasi moneter dengan jangka waktu 1 hari kerja.
- *Lending facility*: penyediaan dana rupiah dari BI kepada bank dalam rangka Operasi Moneter dengan jangka waktu 1 hari kerja.
- Operasi Moneter Syariah (OMS): pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka penyediaan standing facility berdasarkan prinsip syariah.
- Operasi Pasar Terbuka Syariah (OPT Syariah): kegiatan transaksi di pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh BI dengan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Moneter Syariah.
- Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS): surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI.
- Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS): kegiatan penempatan dana Rupiah oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di BI dalam rangka Operasi Moneter Syariah dengan jangka waktu 1 hari kerja.
- Fasilitas Pembiayaan: penyediaan dana rupiah dari BI kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam rangka Operasi Moneter Syariah dengan jangka waktu 1 hari kerja.
- Pasar Uang Antar Bank (PUAB): kegiatan pinjam meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar bank konvensional dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun. PUAB terdiri dari PUAB Pagi Rupiah, PUAB Sore Rupiah, dan PUAB Valuta Asing.
- Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS): kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- Transaksi Pasar Uang: transaksi keuangan berjangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun), yang meliputi Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), *Fine Tune Operation* (FTO), Pasar Uang Antar Bank (PUAB), dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).
- SWBI: bukti Penitipan Dana Wadiah. Penitipan Dana Wadiah adalah penitipan dan berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).
- Wadiah: perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Sejak April 2008, SWBI sudah tidak ada lagi, dan digantikan dengan Surat Berharga Bank Indonesia Syariah (SBIS).
- FASBI: fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank konvensional untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia.

- FTO: transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang dilakukan sewaktu-waktu oleh BI apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek pada waktu, jumlah, dan harga transaksi yang ditetapkan oleh BI.

Perkembangan Uang Beredar dan Indikatornya (Rp Miliar dan %)

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uang Primer (M0)	518,447.34	613,487.51	704,843.21	821,679.24	918,420.87	945,915.93	989,565.03	1,085,796.30
Uang dalam Arti Sempit (narrow money) = M1	605,411	722,991	841,652	887,084	942,221	1,055,440	1,237,643	1,390,807
Uang dalam Arti Luas (broad money) = M2	2,471,206	2,877,220	3,307,508	3,730,409	4,173,327	4,548,800	5,004,977	5,419,165
PDB harga berlaku	6,864,133	7,831,726	8,615,705	9,546,134	10,569,705	11,531,717	12,406,810	13,588,797
Money multiplier M1 (m1)	1.17	1.18	1.19	1.08	1.03	1.12	1.25	1.28
Money multiplier M2 (m2)	4.77	4.69	4.69	4.54	4.54	4.81	5.06	4.99
Velocity of Money M1 (Vm1)	11.34	10.83	10.24	10.76	11.22	10.93	10.02	9.77
Velocity of Money M2 (Vm2)	2.78	2.72	2.60	2.56	2.53	2.54	2.48	2.51
Pertumbuhan (%):								
a. M0		18.33	14.89	16.58	11.77	2.99	4.61	9.72
b. M1		19.42	16.41	5.40	6.22	12.02	17.26	12.38
c. M2		16.43	14.95	12.79	11.87	9.00	10.03	8.28
d. PDB		14.10	10.01	10.80	10.72	9.10	7.59	9.53

Suku Bunga Kebijakan Beberapa Negara (%)

Negara	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Negara Industri Utama									
Amerika Serikat	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.75	1.50	2.50
Euro Area	1.00	1.00	0.75	0.25	0.05	0.05	-	-	-
Jepang	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Inggris	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25	0.50	0.75
Kanada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	1.75
Beberapa Negara Eropa Lainnya									
Rusia	7.75	8.00	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25
Turki	6.50	5.75	5.50	4.50	8.25	7.50	8.00	8.00	24.00
Asia									
RRC	5.81	6.56	6.00	6.00	5.60	4.35	4.35	4.35	4.35
Korea Selatan	2.50	3.25	2.75	2.50	2.00	1.50	1.25	1.50	1.75
Hong Kong SAR	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	1.00	1.75	2.75
India	6.25	8.50	8.00	7.75	8.00	6.75	6.25	6.00	6.50
Indonesia	6.50	6.50	5.75	7.50	7.75	7.50	6.50	6.50	6.50
Malaysia	2.75	3.00	3.00	3.00	3.25	3.25	3.00	3.00	3.25
Filipina	4.00	4.50	3.50	3.50	4.00	4.00	3.00	3.00	4.75
Thailand	2.00	3.25	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Australia dan Oceania									
Australia	4.75	4.25	3.00	2.50	2.50	2.00	1.50	1.50	1.50
New Zealand	3.00	2.50	2.50	2.50	3.50	2.50	1.75	1.75	1.75
Amerika Tengah dan Selatan									
Argentina	10.11	9.08	12.75	30.40	26.94	23.83	24.91	29.20	60.31
Brazil	10.75	11.00	7.25	10.00	11.75	14.25	13.75	7.00	6.50
Mexico	4.50	4.50	4.50	3.50	3.00	3.25	5.75	7.25	8.25

Suku Bunga Internasional (%)

Suku Bunga	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
LIBOR (Deposito dalam USD)								
3 Bulan	0.34	0.35	0.42	0.27	0.23	0.33	0.76	1.29
6 Bulan	0.52	0.52	0.68	0.40	0.33	0.50	1.08	1.49
1 Tahun	0.92	0.84	1.00	0.67	0.56	0.81	1.40	1.80
SIBOR (Deposito dalam USD)								
3 Bulan	0.35	0.35	0.42	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25
6 Bulan	0.52	0.52	0.68	0.41	0.35	0.35	0.35	0.35
1 Tahun	0.92	0.84	1.01	0.68	0.58	0.58	0.58	0.58
US Prime Rates	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.27	3.52	4.13
Japan Prime Rates	1.52	1.5	1.29	1.23	1.18	1.13	0.96	0.98

Spread Tingkat Bunga Rupiah dan US Dollar (%)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Simpanan Berjangka Rp	7.88	7.06	6.09	6.89	8.79	8.47	7.31	6.79
Pinjaman Rupiah	12.28	12.04	11.27	11.82	12.36	12.12	11.21	10.56
Spread Rupiah	4.40	4.98	5.18	4.93	3.57	3.65	3.90	3.77
Simpanan Berjangka \$	2.56	1.69	2.09	2.14	2.25	1.54	0.94	1.26
Pinjaman \$	5.29	5.42	4.99	4.91	5.02	5.12	4.94	4.93
Spread \$	2.73	3.73	2.90	2.77	2.77	3.58	4.00	3.67
Penjaminan DPK	7.00	6.50	5.50	7.25	7.75	-	6.25	5.75
Spread Rp - \$								
a. Simpanan berjangka	5.32	5.37	4.00	4.75	6.54	6.93	6.37	5.53
b. Pinjaman	6.99	6.62	6.28	6.91	7.34	7.00	6.27	5.63

Bab VII Kurs

- Kurs atau nilai tukar (*exchange rate*) adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik. Atau, bisa juga dinyatakan sebagai harga mata uang domestik terhadap mata uang asing.
- *Quotation*:
 1. *Direct quotation*: \$ 0.0000714/Rp
 2. *Indirect quotation*: Rp 14.000/\$

Secara garis besar, sistem kurs terbagi menjadi dua:

1. Sistem kurs tetap (*fixed exchange rate system*): sistem kurs di mana kurs ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Arah pergerakan kurs:
 - a. Devaluasi (*devaluation*): otoritas moneter menetapkan bahwa secara resmi nilai mata uang domestik diturunkan terhadap valuta asing (misalnya, terhadap US dollar)
 - b. Revaluasi (*revaluation*): otoritas moneter menetapkan bahwa secara resmi nilai mata uang domestik dinaikkan terhadap valuta asing (misalnya, terhadap US dollar)
2. Sistem kurs mengambang atau fleksibel (*floating / flexible exchange rate system*) : sistem kurs di mana kurs ditetapkan oleh mekanisme pasar, yakni interaksi permintaan dan penawaran valuta asing. Arah pergerakan kurs:
 - a. Depresiasi (*depreciation*): nilai mata uang domestik melemah terhadap valuta asing (misalnya, terhadap US dollar)
 - b. Apresiasi (*appreciation*): nilai mata uang domestik menguat terhadap valuta asing (misalnya, terhadap US dollar)

Sistem dan Kebijakan Kurs

Waktu	Sistem dan Kebijakan Kurs
Periode Perjuangan Kemerdekaan (1945-1959)	Sistem Nilai Kurs Tetap
1. 6 Maret 1945	Satu Rupiah Jepang disamakan 3 sen NICA
2. 17 Oktober 1945	Penandatanganan Uang Baru, ORI, oleh Menteri Keuangan A.A. Maramis
3. 7 Maret 1946	Nilai Tukar Rupiah didevaluasi sebesar 29,12% (dari Rp 1.88/\$ menjadi Rp 2.65/\$)
4. 30 Oktober 1946	ORI diedarkan
5. 23 Oktober 1949	Satu rupiah ORI = Rp 100 (Luar Jawa dan Madura); Satu rupiah ORI = Rp 5 (Jawa dan Madura)
6. 19 Maret 1950	a. Penetapan sertifikat devisa untuk mendapatkan hak membeli devisa
	b. Penetapan kurs impor resmi = Rp 3,80/\$
	c. Penggunaan <i>multiple exchange rate system</i> (nilai tukar penghasil devisa sebesar 200% dari kurs resmi dan pemakai devisa sebesar 300% dari kurs resmi)
7. Maret 1950	Gunting Sjarifudin atas uang DJB, Hindia Belanda dan Uang NICA.
8. 12 Maret 1950	ORI ditarik dari peredaran
9. 4 Januari 1952	Sertifikat devisa dihapus dan hanya satu kurs resmi yang berlaku untuk ekspor/impor, yaitu Rp 3,80/\$
10. Februari 1952	Devaluasi sebesar 66,7% (Rp 3,80/\$ menjadi Rp 11,40/\$)
11. 20 Juni 1957	Menetapkan sistem kurs mengambang untuk ekonomi tertentu. Misalnya, pemegang ijin impor. Sementara, sektor ekonomi lainnya tetap menggunakan sistem kurs tetap
Periode Ekonomi Terpimpin (1959-1966)	Sistem Nilai Tukar Tetap
1. 25 Agustus 1959	a. Sanering uang : Rp 500 menjadi Rp 50 dan Rp 1000 menjadi Rp 100
	b. Devaluasi kurs Rupiah 74,7% (Rp 11,40/\$ menjadi Rp 45/\$)
2. 13 Desember 1965	Penerbitan uang baru yang diperkecil Rp 1000 uang lama menjadi Rp 1 uang baru)

Waktu	Sistem dan Kebijakan Kurs
Periode Stabilisasi , Rehabilitasi dan Pembangunan Ekonomi (1966 -1983)	Sistem Kurs Tetap (1966 - Nov 1978) dan Sistem Kurs Mengambang Terkendali (Nov 1978 - 1983)
1. Agustus 1971	a. Sistem Devisa bebas b. Devaluasi 9,8 % (dari Rp 378/\$ menjadi Rp 415/\$)
2. 15 November 1978	a. Devaluasi 33,6% (dari Rp 415/\$ menjadi Rp 625/\$) b. Sistem kurs dirubah menjadi sistem kurs mengambang terkendali (managed floating exchange rate system)
Periode Deregulasi Ekonomi (1983-1997)	Sistem nilai tukar mengambang terkendali dengan pita intervensi yang sempit (1983-1992) dan pita intervensi yang lebih lebar (1992-1997)
1. 30 Maret 1983	Devaluasi 38,1% (dari Rp 702,5/\$ menjadi Rp 970/\$)
2. September 1986	Devaluasi 45% (dari Rp 1.134/\$ menjadi Rp 1.644/\$)
3. Septemer 1992	Pelebaran pita intervensi dari Rp 6 (0,25%) menjadi Rp 10 (0,50%)
4. Januari 1994	Pelebaran pita intervensi dari Rp 10 (0,50%) menjadi Rp 20 (1,00%)
5. September 1994	Pelebaran pita intervensi dari Rp 20 (1,00%) menjadi Rp 30 (1,50%)
6. Mei 1995	Pelebaran pita intervensi dari Rp 30 (1,50%) menjadi Rp 44 (2,00%)
7. Desember 1995	Pelebaran pita intervensi dari Rp 44 (2,00%) menjadi Rp 66 (3,00%)
8. Juni 1996	Pelebaran pita intervensi dari Rp 66 (3,00%) menjadi Rp 118 (5,00%)
9. September 1996	Pelebaran pita intervensi dari Rp 118 (5,00%) menjadi Rp 192 (8,00%)
Periode pada saat dan setelah krisis (1997-2003)	Sistem kurs mengambang terkendali yang lebih fleksibel (s/d 13 Agustus 1997) dan sistem kurs mengambang penuh (sejak 14 Agustus 1997)
1. 11 Juli 1997	Pelebaran pita intervensi dari Rp 192 (8,00%) menjadi Rp304 (12,00%)
2. 14 Agustus 1997	Penerapan sistem kurs mengambang penuh (<i>floating exchange rate system</i>)

Lampiran

Perkembangan Kurs terhadap beberapa Valuta Asing

Mata Uang	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C A D	1.00	1.02	0.99	1.06	1.16	1.38	1.34	1.26
E U R 2)	0.75	0.77	0.76	0.73	0.83	0.92	0.95	0.83
G B P	0.64	0.64	0.62	0.60	0.64	0.68	0.81	0.74
J P Y	81.12	76.91	86.75	105.31	119.78	120.22	116.96	112.69
IDR	8,996.00	9,069.00	9,793.00	12,171.00	12,388.00	13,788.00	13,473.00	13,555.00
PHP	43.80	43.84	41.01	44.40	44.72	46.91	49.60	49.85
MYR	3.06	3.17	3.06	3.28	3.50	4.29	4.49	4.05
SGD	1.28	1.30	1.22	1.26	1.33	1.42	1.45	1.34
THB	30.06	31.55	30.59	32.70	32.91	36.03	35.84	32.57
CNY	6.61	6.30	6.23	6.05	6.21	6.49	6.95	6.51
KRW	1,126.00	1,152.45	1,064.40	1,049.80	1,090.98	1,175.06	1,205.83	1,067.40
Pertumbuhan (%):								
C A D		2.00	-2.94	7.07	9.43	18.97	-2.90	-5.97
E U R 2)		2.67	-1.30	-3.95	13.70	10.84	3.26	-12.63
G B P		0.00	-3.13	-3.23	6.67	6.25	19.12	-8.64
J P Y		-5.19	12.79	21.39	13.74	0.37	-2.71	-3.65
IDR		0.81	7.98	24.28	1.78	11.30	-2.28	0.61
PHP		0.09	-6.46	8.27	0.72	4.90	5.73	0.50
MYR		3.59	-3.47	7.19	6.71	22.57	4.66	-9.80
SGD		1.56	-6.15	3.28	5.56	6.77	2.11	-7.59
THB		4.96	-3.04	6.90	0.64	9.48	-0.53	-9.12
CNY		-4.69	-1.11	-2.89	2.64	4.51	7.09	-6.33
KRW		2.35	-7.64	-1.37	3.92	7.71	2.62	-11.48

Bab VIII

Neraca Pembayaran

Untuk memahami kondisi keuangan internasional suatu negara, pelaku ekonomi perlu mempelajari data neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah laporan statistik yang mencatat secara sistematis transaksi ekonomi antara penduduk dan bukan penduduk dalam satu periode tertentu.

Dari semua pos neraca pembayaran, pos transaksi berjalan (*current account*) dan neraca perdagangan (*trade balance* atau *merchandise balance*) merupakan pos yang paling sering dipantau oleh pelaku pasar.

Anatomi Neraca Pembayaran

1. **Transaksi Berjalan (*current account*):**
 - a. Neraca perdagangan (*balance of trade*)
 - b. Neraca jasa (*services account*)
 - c. Neraca pendapatan (*income account*)
 - d. Transfer berjalan (*current transfer*)
2. **Transaksi Modal dan Finansial (*Capital and Financial Account*):**
 - a. Transaksi Modal (*capital account*)
 - b. Transaksi Finansial (*financial account*):
 - i. Investasi langsung (*Direct Investment*)
 - ii. Investasi portofolio (*portfolio investment*)
 - iii. Investasi lainnya (*other investment*)
3. **Neraca pembayaran (*balance of payments*)**

Neraca Perdagangan

Posisi Neraca Perdagangan: Ekspor barang – impor barang:

- Ekspor barang – impor barang > 0 --- (*surplus*)
- Ekspor barang – impor barang $= 0$ --- (*balance*)
- Ekspor barang – impor barang < 0 --- (*deficit*)

Contoh barang:

Mobil, motor, karet, beras, mesin, gandum, tekstil, kayu, kertas, alas kaki, dan lain-lain.

Neraca Jasa

Posisi Neraca Jasa: Ekspor jasa – impor jasa:

- Ekspor jasa – impor jasa > 0 --- (*surplus*)
- Ekspor jasa – impor jasa $= 0$ --- (*balance*)
- Ekspor jasa – impor jasa < 0 --- (*deficit*)

Contoh jasa:

- Jasa komunikasi, perjalanan, transportasi, kesenian, jasa konstruksi, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa komputer & perangkatnya, jasa royalti dan lisensi, dan lain-lain.

Neraca Pendapatan

Ekspor pendapatan – impor pendapatan

- Ekspor pendapatan – impor pendapatan > 0 --- (*surplus*)
- Ekspor pendapatan – impor pendapatan $= 0$ --- (*balance*)
- Ekspor pendapatan – impor pendapatan < 0 --- (*deficit*)

Contoh pendapatan:

- Upah/gaji, dan pendapatan investasi (bunga, keuntungan, dividen, capital gain, dll)

current transfer:

Ekspor Current transfer – impor current transfer

- Ekspor Current transfer – impor current transfer > 0 (*surplus*)
- Ekspor Current transfer – impor current transfer $= 0$ (*balance*)
- Ekspor Current transfer – impor current transfer < 0 (*deficit*)

- *Current transfer* meliputi transfer pemerintah (seperti hibah non investasi hasil kerjasama internasional antar pemerintah dan pembayaran pajak) dan transfer lainnya (seperti *workers' remittances*).

Transaksi modal dan transaksi finansial:

Capital inflows – capital outflows

- Capital inflows – capital outflows > 0 (*surplus*)
- Capital inflows – capital outflows $= 0$ (*balance*)
- Capital inflows – capital outflows < 0 (*deficit*)

- *Capital inflows*: arus masuk modal asing ke dalam negeri
- *Capital outflows*: arus keluar modal domestik ke luar negeri

Transaksi Modal

- Komponen utama transaksi modal adalah (i) transfer modal dan (ii) akuisisi aktiva non produksi, dan non keuangan.
- Transfer modal terdiri dari transfer kepemilikan aktiva tetap yang berhubungan dengan akuisisi atau penyelesaian aktiva tetap; atau pembatalan kewajiban, tanpa disertai imbalan.
- Transfer modal terdiri dari dua komponen: (i) pemerintah umum, seperti 'pengampunan utang' dan (ii) transter modal lainnya, seperti transfer migran.
- Akuisisi aktiva non produksi dan non keuangan sebagian besar meliputi aktiva tak berwujud, seperti paten, sewa (*lease*) atau kontrak yang dapat ditransfer lainnya, *goodwill*, dan lain-lain. Item tersebut tidak mencakup tanah atau lahan untuk kepentingan ekonomi melainkan dalam bentuk pembelian atau penjualan tanah oleh kedutaan besar luar negeri.

Posisi transaksi modal:

Capital inflows (CI) transaksi modal – capital outflows (CO) transaksi modal

- CI transaksi modal – CO transaksi modal > 0 (*surplus*)
- CI transaksi modal – CO transaksi modal $= 0$ (*balance*)
- CI transaksi modal – CO transaksi modal > 0 (*deficit*)
-
- Contoh transaksi modal:

- Hibah investasi (seperti pembangunan rumah tinggal, jembatan, jalan, sekolah, irigasi, kapal untuk keamanan, dll)

Posisi Transaksi Finansial:

Capital inflows (CI) transaksi finansial – capital outflows (CO) transaksi finansial

- CI transaksi finansial – Co transaksi finansial > 0 (*surplus*)
- CI transaksi finansial – Co transaksi finansial $= 0$ (*balance*)
- CI transaksi finansial – Co transaksi finansial < 0 (*deficit*)

Investasi Langsung

Posisi Investasi langsung :

Capital inflows (CI) investasi langsung – capital outflows (CO) investasi langsung

- CI investasi langsung – CO investasi langsung > 0 (*surplus*)
- CI investasi langsung – CO investasi langsung $= 0$ (*balance*)
- CI investasi langsung – CO investasi langsung < 0 (*deficit*)
- Investasi langsung: investasi dalam bentuk aktiva fisik/tetap, seperti pabrik dan peralatan/perlengkapan yang dikelola oleh perusahaan induk.
- Investasi langsung terbagi ke dalam modal ekuitas perusahaan, keuntungan yang diinvestasikan kembali, dan modal lainnya (transaksi antar perusahaan).

Investasi Portofolio

Posisi Investasi portofolio :

Capital inflows (CI) investasi portofolio – capital outflows (CO) investasi portofolio

- CI investasi portofolio – CO investasi portofolio > 0 (*surplus*)
- CI investasi portofolio – CO investasi portofolio $= 0$ (*balance*)
- CI investasi portofolio – CO investasi portofolio < 0 (*deficit*)
- Investasi portofolio: investasi dalam bentuk surat berharga, seperti saham dan surat utang. Surat utang terbagi ke dalam obligasi dan surat utang lainnya, instrumen pasar uang, dan efek derivatif keuangan.

Investasi Lainnya

Posisi Investasi lainnya :

Capital inflows (CI) investasi lainnya – capital outflows (CO) investasi lainnya

- CI investasi lainnya – CO investasi lainnya > 0 (*surplus*)
- CI investasi lainnya – CO investasi lainnya $= 0$ (*balance*)
- CI investasi lainnya – CO investasi lainnya < 0 (*deficit*)
- Investasi lainnya: investasi dalam bentuk kredit perdagangan jangka pendek dan jangka panjang; pinjaman; mata uang dan simpanan, dan piutang serta pinjaman lainnya.

Errors and Omissions

Errors and omissions (selisih perhitungan) atau juga dikenal dengan istilah lain, *statistical discrepancy* adalah selisih yang terjadi karena:

- Kesalahan pencatatan atau kesalahan perhitungan (*errors*);
- Transaksi yang tidak tercatat seperti penyelundupan, perdagangan ilegal, dan lainnya.

Dengan demikian, angka *errors and omissions* timbul dari perbedaan angka antara penjumlahan *reserve account* dengan *monetary account*:

- *Reserve account*: neraca yang menunjukkan perubahan cadangan devisa atau saldo devisa. Datanya berasal dari penjumlahan saldo *current account* dan *capital & financial account*.
- *Monetary account*: saldo devisa yang dicatat berdasarkan transaksi arus devisa yang masuk dan keluar dari dan ke luar suatu negara.

Errors & omissions selalu ada dalam neraca pembayaran karena sumber datanya berasal dari banyak sumber dan perdagangan ilegal/selundupan.

Lampiran

Neraca Pembayaran Indonesia (juta US\$)

KETERANGAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Transaksi Berjalan	5,144	1,685	-24,418	-29,109	-27,510	-17,519	-16,952	-17,293
A. Barang	31,003	33,825	8,680	5,833	6,983	14,049	15,318	18,892
- Ekspor, fob	149,966	191,109	187,346	182,089	175,293	149,124	144,470	168,887
- Impor, fob	-118,963	-157,284	-178,667	-176,256	-168,310	-135,076	-129,152	-149,995
B. Jasa - jasa	-9,791	-9,803	-10,564	-12,070	-10,010	-8,697	-7,084	-7,864
- Ekspor	16,670	21,888	23,660	22,944	23,531	22,221	23,324	24,668
- Impor	-26,461	-31,691	-34,224	-35,015	-33,541	-30,918	-30,407	-32,532
C. Pendapatan	-16,068	-22,337	-22,533	-22,872	-24,483	-22,871	-25,187	-28,321
- Penerimaan	9,505	10,217	10,716	11,110	11,503	13,183	13,880	16,450
- Pembayaran	-25,573	-32,553	-33,250	-33,982	-35,986	-36,054	-39,067	-44,772
II. Transaksi Modal dan Finansial	26,526	13,636	24,909	21,971	44,943	16,860	29,346	29,881
II.A. Transaksi Modal	50	33	51	45	27	17	41	46
II.B. Transaksi Finansial ²	26,476	13,603	24,858	21,926	44,916	16,843	29,306	29,834
1. Investasi Langsung	11,106	11,528	13,716	12,170	14,733	10,704	16,136	20,151
a. Aset	-4,186	-9,037	-7,485	-11,112	-10,388	-9,075	11,594	-1,927
b. Kewajiban	15,292	20,565	21,201	23,282	25,121	19,779	4,542	22,078
2. Investasi Portofolio	13,202	3,806	9,206	10,873	26,067	16,183	18,996	20,662
a. Aset	-2,511	-1,189	-5,467	-1,273	2,587	-1,268	2,218	-3,270
b. Kewajiban	15,713	4,996	14,673	12,145	23,480	17,451	16,778	23,932
- Sektor publik	13,526	827	9,251	10,257	15,380	17,386	16,835	21,877
- Sektor swasta	2,187	4,169	5,422	1,888	8,100	65	-57	2,055
3. Derivatif Finansial	-94	69	13	-334	-156	20	-9	-128
4. Investasi Lainnya	2,262	-1,801	1,922	-783	4,272	-10,064	-5,817	-10,851
a. Aset	-1,725	-6,754	-5,353	-3,427	-3,427	-11,812	1,499	-13,242
b. Kewajiban	3,987	4,954	7,275	2,645	7,699	1,748	-7,316	2,391
- Sektor publik	1,756	-2,258	2,453	-1,376	-4,209	-190	-2,369	-1,353
- Sektor swasta	2,231	7,212	4,822	4,020	11,907	1,938	-4,947	3,744
III. Total (I + II)	31,670	15,321	491	-7,139	17,433	-659	12,394	12,588
IV. Selisih Perhitungan Bersih	-1,327	-3,465	-275	-186	-2,184	-439	-305	-1,002
V. Neraca Keseluruhan (III + IV)	30,343	11,857	215	-7,325	15,249	-1,098	12,089	11,586
VI. Cadangan Devisa dan yang terkait ³	-30,343	-11,857	-215	7,325	-15,249	1,098	-12,089	-11,586
Memorandum:								
- Posisi Cadangan Devisa	96,207	110,123	112,781	99,387	111,862	105,931	116,362	130,196
Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	7.56	6.74	6.15	5.47	6.45	7.39	8.42	8.28
- Transaksi Berjalan (% PDB)	0.67	0.19	-2.65	-3.19	-3.09	-2.03	-1.82	-1.7

Posisi Cadangan Devisa (juta US\$)

NO	KETERANGAN	2007	2008	2009	2010	2011
1	Cadangan dalam Valuta Asing	54.556,00	49.163,00	60.369,00	89.751,12	103.380,10
	a. Surat Berharga	32.688,00	45.476,00	57.100,00	82.978,85	90.794,68
	b. Uang Kertas Asing (UKA) dan Simpanan	21.868,00	3.687,00	3.269,00	6.772,27	12.585,42
2	Reserve Position in the Fund (RPF)	228,00	225,00	227,00	224,10	222,70
3	Special Drawing Right (SDRs)	9,00	34,00	2.753,00	2.713,83	2.695,91
4	Emas Moneter	1.946,00	2.041,00	2.552,00	3.298,77	3.593,33
5	Tagihan Lainnya	182,00	175,00	203,00	219,03	230,80
	Total Cadangan Devisa	56.921,00	51.638,00	66.104,00	96.206,85	110.122,84
	PDB Harga Berlaku (miliar Rp)	3.950.893	4.948.688	5.606.203	6.436.271	7.427.086
	Kurs Tengah BI (Rp/\$)	9.419	10.950	9.400	8.991	9.068
	PDB Harga Berlaku (juta US\$)	419.459,92	451.934,98	596.404,57	715.857,08	819.043,45
	Rasio Cadangan Devisa terhadap PDB (%)	13,57	11,43	11,08	13,44	13,45

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (beberapa edisi). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*.
- Departemen Keuangan. (beberapa edisi). *Nota Keuangan dan APBN*.
- Simorangkir, I., dan Suseno.(.....). “Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar. *Seri Kebanksentralan No. 12*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia
- Solikin dan Suseno. (2002).”Penyusunan Statistik Uang Beredar”. *Seri Kebanksentralan No. 2*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia
- Sugiyono, F.X. (2002). “Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan”. *Seri Kebanksentralan No. 4*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia
- Utari, G.A. Diah, dkk. (2015). “Inflasi di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliannya”. *Seri Kebansentralan No. 23*. Bank Indonesia Institute
- Warjiyo, P., dan Soliki. (2003). “Kebijakan Moneter di Indonesia”. *Seri Kebanksentralan No. 6*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia

Website:

- Badan Pusat Statistik (<http://www.bps.go.id>)
- Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>)